

## KEYNOTE SPEECH

### PERLUNYA PENYAMAAN PERSEPSI DAN PENINGKATAN KOMITMEN DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Wahjudi Wardoyo  
Kepala Badan Libang Kehutanan, Departemen Kehutanan

#### Abstrak

Secara teoritis, DAS mencakup seluruh wilayah daratan sehingga pengelolannya akan menentukan naik turunnya produktivitas lahan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. DAS juga telah disepakati sebagai unit manajemen terkecil sehingga terjadi berbagai interaksi kegiatan dan keterlibatan berbagai stakeholder yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Untuk membuat suatu perencanaan yang baik dan dapat diimplementasikan oleh setiap stakeholder maka perlu menyamakan persepsi dan meningkatkan komitmen dari setiap pihak yang terlibat. Persamaan persepsi demikian perlu dukungan data dan informasi yang valid sehingga diperlukan pengembangan sistem infrastruktur data yang memadai.

#### 1. Pendahuluan

Bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan yang sering terjadi akhir-akhir ini menyebabkan banyak orang sadar akan arti pentingnya mengelola DAS dengan baik. Meskipun kita tahu bahwa bencana alam tersebut kadang juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi secara global. Berdasarkan pengertian, DAS adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi secara topografis oleh punggung bukit dan merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan yang jatuh di dalamnya mengalir menuju danau atau laut melalui titik keluaran (outlet) pada sungai utama sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Oleh karena itu, karakteristik pantai selain dipengaruhi oleh sifat laut juga dipengaruhi sifat yang berasal dari wilayah hulu, baik sedimen maupun bahan terlarut dan terangkut lainnya. Faktor utama yang menghubungkan bagian hulu (pegunungan dan perbukitan) dengan hilir (di wilayah pantai) dalam suatu DAS adalah siklus/daur hidrologi. Sebagai suatu unit hidrologi, DAS dideskripsikan dan difungsikan sebagai unit biofisik sekaligus unit sosial ekonomi dan politik dalam perencanaan maupun implementasi pengelolaan sumberdaya lahan.

DAS juga telah disepakati sebagai unit pengelolaan terkecil sejak tahun 1978. Hal ini berarti mulai dari tingkat perencanaan semua institusi dan masyarakat terkait harus ikut memikirkan kegiatan yang patut dilaksanakan sehingga semua kegiatan yang terdapat didalamnya merupakan usaha yang saling mendukung. Adanya usul agar masyarakat yang tinggal di daerah hilir, memberikan kompensasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah hulu sudah dibicarakan sejak lama tapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih jarang dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang sudah melaksanakan kompensasi tersebut

### 3. Penyamaan Persepsi

Semua pihak yang ikut terlibat dan berkepentingan di dalam pengelolaan suatu DAS, seharusnya ikut memikirkan apa yang patut dikerjakan sehingga produktivitas DAS dapat diperoleh secara optimal dan lestari. Semua pihak perlu diberikan pengertian dan menyadari tentang kemampuan lahan dan daya dukung dari DAS tersebut. Informasi termasuk pengalaman masyarakat yang tinggal di dalam DAS yang bersangkutan perlu diketahui oleh semua yang terlibat. Dengan demikian dari sejak perencanaan, apa yang mau dikerjakan dapat disusun bersama dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Keterlibatan semua pihak sejak dari awal ini akan dapat menumbuhkan rasa memiliki dari seluruh masyarakat yang tinggal di dalam DAS terhadap kegiatan yang dikerjakan. Disamping itu, keterlibatan semua pihak tersebut juga akan menimbulkan persamaan persepsi dalam pengelolaan DAS yang mendukung hidup dan kehidupan mereka.

Upaya tersebut tidak akan terjadi dengan sendirinya. Untuk itu diperlukan fasilitator dan motivator agar inisiatif awal dapat digulirkan. Apabila inisiatif ini telah bergulir, maka dukungan berikutnya adalah regulator dan ketersediaan dana untuk menjamin bahwa inisiatif yang sudah bergulir tersebut dapat terus bergulir dan berkembang. Berbagai kegiatan yang akan dikembangkan, termasuk misalnya jenis tanaman, cara menanam, keuntungan dan pengaruhnya terhadap keadaan sekelilingnya seyogiannya sudah diketahui oleh semua pihak, sehingga antisipasi sudah dapat dipersiapkan sejak awal. Dari uraian yang sederhana ini jelas terlihat bahwa institusi yang sangat berperan dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan DAS yang baik bukan hanya Pemerintah (sebagai regulator) tetapi juga berbagai pihak yang dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, dan donor. Dengan kata lain, tiga pilar pelaksanaan good governance yaitu masyarakat, pengusaha dan pemerintah menjadi komponen penting dalam pengelolaan DAS yang baik.

Pengelolaan lahan DAS secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni: (a) pengelolaan lahan yang "dikuasai" negara seperti kawasan hutan dan kawasan perkebunan; (b) pengelolaan lahan yang dikuasai masyarakat seperti hutan rakyat, kebun masyarakat dan pengelolaan lahan milik lainnya.

Menurut fungsinya kawasan hutan dapat dibagi menjadi hutan lindung, kawasan konservasi, dan hutan produksi (produksi terbatas, produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi). Pada dasarnya semua fungsi kawasan hutan tersebut mengandung multifungsi, misalnya hutan lindung tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tata air, tetapi juga menghasilkan hasil hutan non-kayu dan jasa hutan lainnya, seperti estetika, udara bersih, dan lainnya. Hutan produksi tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga menghasilkan jasa air, penahan karbon dan udara bersih. Dengan demikian, seluruh kawasan hutan dapat mempunyai peran penting untuk mengoptimalkan fungsi DAS.

Dalam rangka menjaga fungsi hutan tersebut, Pemerintah cq. Departemen Kehutanan berupaya untuk meningkatkan tutupan vegetasi di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan dengan beberapa program, diantaranya Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH), Kecil Menanam Dewasa Memanen, Indonesia Menanam dan sebagainya. Tujuan dari upaya tersebut pada dasarnya adalah untuk meningkatkan fungsi DAS. Namun demikian, upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuan dengan baik apabila persepsi dari pihak-pihak yang terkait belum dapat

diselaraskan. Sebagai contoh, penentuan tempat rehabilitasi dan pemilihan jenis yang akan ditanam masih sering diperdebatkan karena ketidak-samaan persepsi. Apabila hal semacam ini dibiarkan terus, maka akan menyebabkan kegagalan program dan menyengsarakan masyarakat umum.

Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan sebesar 77.806.878 Ha. Dengan asumsi bahwa luas daratan sudah terbagi dalam luasan DAS, maka sudah saatnya lahan kritis ini direhabilitasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAS. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 1. Memperhatikan bahwa luasan lahan kritis tersebar pada kawasan DAS, Pemerintah melalui Dephut telah menetapkan DAS-DAS prioritas dan upaya penanganannya.

Tabel 1. Luas Lahan Kritis Indonesia

No	Fungsi Kawasan	Kriteria Lahan Kritis			Total
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
I	Luar Kawasan	16,082,933	8,587,558	2,102,753	26,773,245
II	Dalam Kawasan	31,527,148	14,718,675	4,787,813	51,033,633
	Hutan Konservasi	3,002,261	1,021,015	332,077	4,355,352
	Hutan Lindung	6,051,764	2,527,270	724,664	9,303,699
	Hutan Produksi	22,473,121	11,170,389	3,731,072	37,374,582
	<b>JUMLAH</b>	<b>47,610,081</b>	<b>23,306,233</b>	<b>6,890,567</b>	<b>77,806,878</b>

Apabila bercermin kepada keberhasilan negara lain, Korea Selatan adalah suatu negara yang kegiatan rehabilitasinya berhasil di dunia. Target rehabilitasi dari setiap wilayah umumnya tidak luas berkisar antara 40-100 Ha per tahun tapi keberhasilannya sangat tinggi. Hal ini juga patut diikuti perencana di Indonesia. Bila dari setiap Kabupaten ditargetkan untuk berhasil melakukan rehabilitasi pada areal yang tidak luas, misalnya hanya 200 Ha, maka diharapkan hasilnya akan maksimal. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan luas wilayah yang harus direhabilitasi. Semakin kecil capaian/keberhasilan maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan lahan kritis seluas 77.806.878 ha tersebut.

#### 4. Perlunya Peningkatan Komitmen

Keputusan yang telah diambil dalam penyamaan persepsi dan perencanaan tersebut di atas perlu dipatuhi sehingga implementasinya dapat berjalan lancar. Ada kemungkinan dalam waktu pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dapat dimodifikasi agar hasilnya dapat lebih tinggi. Pada dasarnya, peningkatan komitmen adalah seberapa jauh persepsi yang telah sama dan perencanaan yang telah padu tersebut diimplementasikan di lapangan. Komitmen yang dibuat di atas kertas dan di dalam pertemuan-pertemuan tidak akan ada artinya tanpa adanya aktivitas nyata di lapangan.

Pernbaharuan data dan sharing data antar institusi terkait merupakan bagian penting dalam peningkatan komitmen antar institusi. Data yang terus menerus diperbaharui dan dipertukarkan antar institusi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja di lapangan. Agar data dapat saling dipertukarkan dengan mudah, maka

## ***Perlunya Penyamaan Persepsi dan Peningkatan Komitmen dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai***

---

diperlukan format dan standar yang disepakati bersama antar stakeholders, mulai dari bagaimana data itu dikumpulkan, diolah dan disajikan.

Dalam era otonomi daerah ini, peran Pemerintah Kabupaten menjadi sangat penting, tidak terkecuali dalam pelaksanaan pengelolaan DAS. Oleh karena itu, peningkatan komitmen dari Pemerintah Kabupaten menjadi sangat penting, misalnya dalam bentuk responsibilitas yang semakin tinggi. Tentu saja tugas, kewenangan dan keahlian dari masing-masing institusi akan menentukan institusi mana yang akan bertanggung-jawab untuk tugas tertentu. Namun demikian, kendala dan keterbatasan sering dihadapi oleh setiap institusi. Oleh karena itu, tanpa menafikan tugas dan tanggung-jawab institusi tertentu, bahu-membahu dalam pelaksanaan tanggung-jawab dan perolehan data sangatlah diperlukan.

### **5. Kesimpulan dan Saran**

1. Mengingat luasnya lahan kritis, maka penanganannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan didasarkan pada data yang akurat. Pengembangan Infrastruktur Data yang valid dan akurat sangat diperlukan sehingga kegiatan karakterisasi DAS yang dilakukan pada masing-masing DAS bersangkutan lebih faktual dan rasional.
2. Penanganan rehabilitasi lahan kritis baik di didalam maupun di luar kawasan hutan harus disesuaikan dengan keadaan lokasi maupun adat istiadat masyarakat setempat (*site specific*).
3. Penyamaan persepsi dan peningkatan komitmen sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan DAS secara terpadu yang melibatkan semua stakeholder, terutama stakeholder yang mampu menjalankan fungsinya sebagai inisiator, fasilitator, regulator, implementator dan donor.
4. Implementasi *good governance* akan dapat mendorong percepatan terwujudnya *integrated watershed management* yang sampai saat ini masih dalam tataran perencanaan. Untuk itu, tiga pilar Masyarakat, Pemerintah dan Pengusaha harus secara bersama-sama membangun persepsi yang sama dan meningkatkan komitmennya.

***Keynote Speech***